

**PERAN KADER INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN (IMP) DALAM
MENUNJANG KEBERHASILAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA
DI DESA MARGACINTA KECAMATAN CIJULANG
KABUPATEN PANGANDARAN**

SENI SONATA

ABSTRAK

Berdasarkan hasil peninjauan awal diketahui bahwa pencapaian program KB di Desa Margacinta Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran belum optimal hal ini dikarenakan oleh kurangnya peran Institusi Masyarakat Pedesaan dalam mendorong program KB di Desa tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimanakah Peran Kader IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) dalam menunjang keberhasilan program KB?; 2) Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi Kader IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) dalam menunjang keberhasilan program KB ?; 3) Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi Kader IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) dalam menunjang keberhasilan program KB ?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Lamanya penelitian selama 8 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 16 orang. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan verifikasi data.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :1) Peran Kader IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) dalam menunjang keberhasilan program KB secara umum sudah berperan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari pendapat informan bahwa Peran Kader IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) dalam menunjang keberhasilan program KB yang menyatakan sudah baik sebesar 53,41% dan yang menyatakan masih kurang sebesar 46,59%. Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa Peran Kader IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) dalam menunjang keberhasilan program KB sudah melaksanakan tujuh peran Institusi Masyarakat Pedesaan dalam menunjang keberhasilan program KB di desa menurut BKKBN (2011:5); 2) terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Peran Kader IMP seperti kurangnya Kader IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) dalam melakukan bekerja sama dengan masyarakat. 3) Kader IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) dalam menunjang keberhasilan program KB berupaya mengoptimalkan kader Institusi Masyarakat Pedesaan dalam melakukan analisis motivasi dan kemampuan masyarakat untuk melakukan perubahan.

Kata Kunci : *Peran Kader Institusi Masyarakat Pedesaan, Program Keluarga Berencana*

A. PENDAHULUAN

Keberhasilan yang dicapai dalam program KB bukan semata-mata karena kerja keras Penyuluh KB atau petugas lapangan KB lainnya, tetapi juga berkat dukungan dan peran serta seluruh komponen masyarakat. Salah satu komponen masyarakat yang secara aktif berperan dalam pembangunan Program KB adalah Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP). Kader IMP mempunyai andil yang cukup besar dalam proses pelebagaan program KB di masyarakat.

Kedudukan dan peran Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam pembangunan KB di Indonesia sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Sejak dirintisnya pola pembinaan peserta KB (akseptor) yang melibatkan masyarakat sebagai pelaksana. IMP telah menunjukkan eksistensi dan peran baktinya dalam menunjang kesuksesan Program KB Nasional. Hasilnya sungguh menggembirakan. Sekarang ini pola pelaksanaan KB di Indonesia banyak ditiru oleh bangsa-bangsa di dunia khususnya negara-negara berkembang dengan persoalan demografis serupa.

Institusi Masyarakat Pedesaan sendiri pada hakekatnya merupakan wadah pengelolaan dan pelaksanaan Program KB Nasional mulai dari tingkat Desa/Kalurahan, Dusun/RW hingga tingkat RT. di tingkat Desa/Kelurahan disebut Koordinator Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Koord. PPKBD), di tingkat Dusun dinamakan Pembantu

Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan ditingkat RT dinamakan Sub Pembantu Pembina KB Desa (Sub PPKBD).

Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) saat ini memiliki 6 (enam) peran dalam rangka ikut mensukseskan program KB yang kemudian dikenal dengan istilah "Enam Peran Bakti Institusi". Keenam peran bakti institusi tersebut adalah: Pengorganisasian, Pertemuan, KIE dan Konseling, Pencatatan Pendataan, Pelayanan Kegiatan dan Kemandirian.

Berdasarkan hasil peninjauan awal diketahui bahwa pencapaian program KB di Desa Margacinta Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran belum optimal hal ini dikarenakan oleh kurangnya peran Institusi Masyarakat Pedesaan dalam mendorong program KB di Desa tersebut. Adapun kurangnya peran Institusi Masyarakat Pedesaan dapat ditunjukkan dari adanya indikator-indikator sebagai berikut :

Diduga kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) belum menunjukkan keaktifan dalam memberikan sosialisasi, motivasi dan memfasilitasi masyarakat dan lingkungannya serta kurang melibatkan diri dalam aktivitas keaktifan KB. Contohnya : masih kurang pro aktifnya kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) untuk turut serta terhadap program KB sehingga pencapaian program KB masih rendah.

Diduga kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) belum

dapat berperan sebagai penggerak masyarakat dalam program-program KB. Padahal Institusi Masyarakat Pedesaan ini diharapkan bisa mengarahkan, membimbing dan menggerakkan aktivitas KB. Contohnya : masih kurangnya kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) untuk memberikan kesadaran masyarakat akan pentingnya program KB sehingga masyarakat masih kurang aktif dalam menggunakan alat kontrasepsi.

Diduga kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang ada di Desa Margacinta belum mampu berperan dalam mengatasi berbagai permasalahan KB dan belum mampu mengakomodir agar aktivitas berjalan baik. Contohnya masih kurangnya kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) terlibat langsung dalam berbagai forum atau kegiatan yang menunjang terlaksananya program KB.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Peran Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam menunjang keberhasilan program Keluarga Berencana di Desa Margacinta Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran”**

Bertolak dari permasalahan tersebut tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimanakah Peran Kader IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) dalam menunjang keberhasilan program KB

di Desa Margacinta Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran? 2) Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi Kader IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) dalam menunjang keberhasilan program KB di Desa Margacinta Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran ? 3) Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi Kader IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) dalam menunjang keberhasilan program KB di Desa Margacinta Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran?

B. LANDASAN TEORI

Salah satu pihak yang dapat mendorong keberhasilan suatu program KB di masyarakat adalah peran Institusi Masyarakat Pedesaan. Namun sebelum penulis jelaskan pengertian Institusi Masyarakat Pedesaan maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian peran sebagai berikut.

Menurut Soekanto, (2000: 115) : “Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi, peran juga dapat diartikan sebagai perikelakuan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat”. Selanjutnya menurut Yasyin, (1999: 58) menyatakan bahwa :”Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang

bersangkutan menjalankan suatu peranan”.

Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) menurut BKKBN (2005:9) adalah :

Institusi masyarakat pedesaan pada hakekatnya merupakan wadah pengelolaan dan pelaksanaan Program KB Nasional mulai dari tingkat Desa/Kalurahan, Dusun/RW hingga tingkat RT. Ditingkat Desa/Kalurahan disebut Koordinator Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Koord.PPKBD), di tingkat Dusun dinamakan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan ditingkat RT dinamakan Sub Pembantu Pembina KB Desa (Sub PPKBD).

Tugas Institusi masyarakat pedesaan hampir sama dengan PKB/PLKB dalam operasional program KB di tingkat desa. Oleh karena itu Institusi masyarakat pedesaan sangat berperan dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang program KB. Sebelum membahas lebih lanjut tentang program KB maka penulis sajikan terlebih dahulu pengertian penyuluhan.

Penyuluhan bersumber dari kata suluh yang berarti 'obor', dalam arti kita mampu memberi penerangan dari keadaan gelap menjadi terang. Mulyana (2007:11) menyatakan bahwa :

Penyuluhan sebagai usaha pendidikan non formal untuk mengajak orang mau melaksanakan ide-ide baru, Penyuluhan juga merupakan

kegiatan memberikan pendidikan kepada masyarakat, memberi mereka pengetahuan, informasi-informasi, dan kemampuan-kemampuan baru, agar mereka dapat membentuk sikap dan berperilaku hidup menurut apa yang seharusnya.

Berdasarkan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Institusi masyarakat pedesaan merupakan wadah pengelolaan dan pelaksanaan Program KB Nasional mulai dari tingkat Desa/Kalurahan, Dusun/RW hingga tingkat RT. keberadaan institusi masyarakat pedesaan diharapkan dapat membantu keberhasilan program KB di tingkat desa.

Menurut BKKBN (2011:5) menyatakan terdapat tujuh peran Institusi Masyarakat Pedesaan dalam menunjang keberhasilan program KB di desa. Adapun ketujuh peran tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Kepengurusan
2. Penyuluhan, motivasi dan konseling
3. Pelayanan ulang/rujukan
4. Pendataan dan pencatatan
5. Pertemuan rutin
6. Kegiatan program KB
7. Kegiatan Kemandirian.

Dengan demikian Peran kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) sangatlah penting dan menjadi satu kekuatan yang dapat diandalkan untuk tetap dapat mempertahankan keberhasilan program KB di masyarakat. Tanpa kader Institusi

Masyarakat Pedesaan (IMP), program KB dipastikan sudah tidak berjalan lagi dan tidak mampu mempertahankan keberhasilan yang pernah dicapai. Tentu saja ini didukung oleh personil kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang cukup banyak hingga menjangkau seluruh desa, dusun dan RT serta memiliki daya juang yang tinggi dalam rangka ikut mensukseskan program KB.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini sebanyak 16 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu studi pustaka (*literature study*), studi lapangan (observasi, wawancara (*interview*)). Teknik analisis data kualitatif dalam penelitian ini yaitu :

1. Reduksi data
2. Penyajian data
3. Menarik kesimpulan/verifikasi

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peran Kader IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) dalam menunjang keberhasilan program KB di Desa Margacinta Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil wawancara tiap-tiap dimensi dengan informan mengenai pelaksanaan penyuluhan oleh Kader IMP (Institusi Masyarakat

Pedesaan) dalam menunjang keberhasilan program KB di Desa Margacinta Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran, hasil wawancara tersebut dapat diuraikan sebagai berikut

1. Kepengurusan
2. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa selama ini keikutsertaan masyarakat dalam kepengurusan melalui kerjasama dengan tokoh masyarakat dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi kegiatan program KB masih kurang hal ini dikarenakan masih kurangnya masyarakat berperan aktif dengan melibatkan diri dalam kepengurusan kegiatan-kegiatan program KB
3. Sementara itu berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam kepengurusan melalui kerjasama dengan tokoh masyarakat dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi kegiatan program KB masih kurang hal ini terlihat dari kehadiran masyarakat masih kurang dalam berbagai kegiatan walaupun telah diundang.
2. Penyuluhan, motivasi dan konseling

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa kader Institusi Masyarakat Pedesaan sudah mengajak PUS agar menjadi peserta KB walaupun belum optimal karena tingkat pengetahuan masyarakat yang masih

kurang sehingga pelaksanaan penyuluhan, pembinaan maupun penyebarluasan wawasan kepada masyarakat tentang penggunaan alat kontrasepsi belum optimal

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa selama ini institusi masyarakat pedesaan (IMP) masih kurang rutin/kontinu dalam memberikan penyuluhan, pembinaan maupun penyebaran informasi terkait kegunaan alat kontrasepsi kepada pasangan usia subur, hal ini terlihat dengan masih jarang nya kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan kader ataupun berkunjung ke setiap dusun ataupun RT untuk memberikan pengetahuan pada masyarakat tentang alat kontrasepsi

3. Pelayanan ulang/rujukan

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa Kader IMP kurang optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat hal ini dikarenakan adanya hambatan dalam menyalurkan kontrasepsi ulang pil dan kondom kepada masyarakat di Desa Margacinta Kecamatan Cijulang

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa selama ini institusi masyarakat pedesaan (IMP) kurang mengarahkan calon peserta KB untuk ke pelayanan KB Mandiri dengan menggunakan alat kontrasepsi yang efektif dengan menyalurkan kontrasepsi ulang pil dan kondom kepada masyarakat.

4. Pendataan dan pencatatan

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa selama ini kader

kesulitan untuk melakukan pendataan sebagai sarana motivasi untuk mendorong setiap keluarga untuk meningkatkan kesejahteraannya sekaligus merangsang kepedulian keluarga yang lebih sejahtera untuk bersama-sama mengangkat keluarga Pra Sejahtera dan KS I agar mencapai tahapan yang lebih tinggi

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa selama ini institusi masyarakat pedesaan (IMP) kurang melakukan pendataan kepada masyarakat sehingga kurang memberikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil yang telah dicapai.

5. Pertemuan rutin

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa selama ini institusi masyarakat pedesaan (IMP) kurang melakukan pertemuan rutin pada Rakor Kecamatan dan Rakor Desa dan kurangnya pertemuan dengan anggota maupun dengan PLKB karena kurangnya dukungan anggaran bagi kader IMP untuk mengikuti berbagai kegiatan yang dilaksanakan

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa selama ini institusi masyarakat pedesaan (IMP) kurang menunjukkan adanya keberhasilan yang selama ini diprogramkan kader, hal ini dikarenakan kader kurang mengikuti kegiatan rakor di kecamatan maupun di desa.

6. Kegiatan program KB

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa kader IMP

belum optimal menggunakan sarana posyandu dalam menyebarluaskan informasi tentang KB dan belum optimal dalam melakukan kegiatan bina keluarga serta kurang optimal dalam melakukan kegiatan di UPPKs sehingga masyarakat belum menyadari akan pentingnya kesehatan ibu dan anak.

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa selama ini institusi masyarakat pedesaan (IMP) kurang mendapat dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan kegiatan posyandu mengingat belum optimalnya sosialisasi program KB melalui kegiatan posyandu, kurangnya kegiatan bina keluarga dan masih kurangnya melibatkan masyarakat dalam kegiatan UPPKs.

7. Kegiatan Kemandirian

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwaselama ini petugas dirasakan masih belum optimal dalam melakukan berbagai pendekatan dengan masyarakat baik melalui kegiatan arisan maupun mengadakan iuran dengan peserta KB sehingga kurang mampu untuk menciptakan suasana kekeluargaan, hal ini dapat ditunjukkan dengan kurangnya komunikasi dengan masyarakat, petugas bersifat formal saja dalam menjalankan tugas.

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa selama ini institusi masyarakat pedesaan (IMP) dalam melakukan tugasnya dirasakan masih kurang dapat menciptakan rasa kekeluargaan.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi Kader IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) dalam menunjang keberhasilan program KB di Desa Margacinta Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil wawancara tiap-tiap indikator mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyuluhan oleh Institusi masyarakat pedesaan (IMP) dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang alat kontrasepsi di Desa Margacinta Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran sebagai berikut :

1. Kepengurusan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa selama kader IMP mengalami hambatan keterbatasan anggaran untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam menunjang terlaksananya program KB hal ini terlihat masih jarang nya kegiatan yang dilakukan oleh kader IMP dalam mengadakan berbagai pertemuan dengan tokoh masyarakat

Sementara itu berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa adanya hambatan dalam mengikutsertakan masyarakat dalam kepengurusan melalui kerjasama dengan tokoh masyarakat dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi kegiatan program KB hal ini disebabkan oleh kurangnya peran aktif masyarakat dalam menunjang berbagai kegiatan KB yang dilaksanakan di masyarakat.

2. Penyuluhan, motivasi dan konseling

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa adanya hambatan kader Institusi Masyarakat Pedesaan sudah mengajak PUS agar menjadi peserta KB karena adanya persepsi masyarakat yang keliru tentang program KB menjadi salah satu permasalahan dalam menunjang program KB serta keengganan sebagian besar warga masyarakat untuk terlibat langsung dalam suatu program kegiatan. Hal ini disebabkan karena keadaan sosio-kultural mereka yang belum memungkinkan untuk secara aktif menyuatkan keinginan mereka.

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa selama ini institusi masyarakat pedesaan (IMP) mengalami hambatan dalam memberikan penyuluhan, pembinaan maupun penyebaran informasi terkait kegunaan alat kontrasepsi kepada pasangan usia subur, hal ini disebabkan masyarakat karena kurang aktif mengikuti kegiatan penyuluhan walaupun kader IMP telah menyebarluaskan informasi.

3. Pelayanan ulang/rujukan

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa Kader IMP kurang optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat hal ini dikarenakan adanya hambatan dalam menyalurkan kontrasepsi ulang pil dan kondom kepada masyarakat di Desa Margacinta Kecamatan Cijulang karena terhambat oleh kurangnya alkon yang disediakan oleh dinas kesehatan dan

kurangnya pengayoman kepada peserta KB serta kurangnya kader IMP dalam merujuk peserta KB untuk memperoleh pelayanan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa selama ini institusi masyarakat pedesaan (IMP) kurang mengarahkan calon peserta KB untuk ke pelayanan KB Mandiri dengan menggunakan alat kontrasepsi yang efektif dengan menyalurkan kontrasepsi ulang pil dan kondom kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat kesulitan untuk memperoleh alat kontrasepsi.

4. Pendataan dan pencatatan

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa selama ini kader IMP mengalami hambatan untuk melakukan pendataan sebagai sarana motivasi untuk mendorong setiap keluarga untuk meningkatkan kesejahteraannya sekaligus merangsang kepedulian keluarga yang lebih sejahtera untuk bersama-sama mengangkat keluarga Pra Sejahtera dan KS I agar mencapai tahapan yang lebih tinggi sehingga kader IMP kesulitan dalam membuat pelaporan hasil pendataan.

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa selama ini institusi masyarakat pedesaan (IMP) mengalami hambatan dalam melakukan pendataan kepada masyarakat sehingga kurang memberikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil yang telah dicapai.

5. Pertemuan rutin

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwaselama ini institusi masyarakat pedesaan (IMP) kurang melakukan pertemuan rutin pada Rakor Kecamatan dan Rakor Desa dan kurangnya pertemuan dengan anggota maupun dengan PLKB karena kurangnya dukungan anggaran bagi kader IMP untuk mengikuti berbagai kegiatan yang dilaksanakan karena selama ini tidak ada anggaran khusus bagi kader IMP namun kebanyakan berasal dari kas RT maupun RW.

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa selama ini institusi masyarakat pedesaan (IMP) kurang menunjukkan adanya keberhasilan yang selama ini diprogramkan kader, hal ini dikarenakan kader kurang mengikuti kegiatan rakor di kecamatan maupun di desadan kurangnya mengadakan pertemuan dengan anggota serta PLKB sehingga kurang melaksanakan perannya dan berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan program KB.

6. Kegiatan program KB

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa kader IMP mengalami hambatan dalam mengoptimalkan penggunaan sarana posyandu dalam menyebarluaskan informasi tentang KB dan belum optimal dalam melakukan kegiatan bina keluarga serta kurang optimal dalam melakukan kegiatan di UPPKS

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa selama ini adanya hambatan institusi masyarakat pedesaan (IMP) dalam mendapat

dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan kegiatan posyandu mengingat belum optimalnya sosialisasi program KB melalui kegiatan posyandu, kurangnya kegiatan bina keluarga dan masih kurangnya melibatkan masyarakat dalam kegiatan UPPKS.

7. Kegiatan Kemandirian

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwaselama ini kader IMP mengalami hambatan dalam melakukan berbagai pendekatan dengan masyarakat baik melalui kegiatan arisan maupun mengadakan iuran dengan peserta KB

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi Kader IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) dalam menunjang keberhasilan program KB di Desa Margacinta Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil wawancara tiap-tiap indikator mengenai upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi Kader IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) dalam menunjang keberhasilan program KB di Desa Margacinta Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran sebagai berikut :

1. Kepengurusan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa selama ini dilakukan berbagai upaya untuk mengikutsertakan masyarakat dalam kepengurusan melalui kerjasama dengan tokoh masyarakat dalam

melakukan perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi kegiatan program KB dengan melakukan berbagai kegiatan dengan melibatkan tokoh masyarakat sehingga dapat membantu kader IMP dalam mensosialisasikan program KB kepada masyarakat.

Sementara itu berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa upaya mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi institusi masyarakat pedesaan (IMP) dalam menjalin kerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, generasi muda, dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di desa yaitu dengan melakukan berbagai kegiatan dengan melibatkan tokoh masyarakat

2. Penyuluhan, motivasi dan konseling

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa kader Institusi Masyarakat Pedesaan sudah mengajak PUS agar menjadi peserta KB yaitu dengan mengajak peran aktif masyarakat dalam mendukung program KB melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan secara rutin baik di tingkat RT, RW maupun desa.

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa selama ini institusi masyarakat pedesaan (IMP) memberikan penyuluhan, pembinaan maupun penyebaran informasi terkait kegunaan alat kontrasepsi kepada pasangan usia subur, yaitu dengan mengajak peran serta masyarakat pada program KB melalui kegiatan penyuluhan maupun kegiatan posyandu sehingga masyarakat semakin yakin

dan paham terkait manfaat KB dan melaksanakan berbagai kegiatan penyuluhan secara rutin dengan melibatkan masyarakat

3. Pelayanan ulang/rujukan

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa Kader IMP dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menyalurkan kontrasepsi ulang pil dan kondom kepada masyarakat di Desa Margacinta Kecamatan Cijulang yaitu dengan meminta dukungan dari dinas kesehatan untuk menambah ketersediaan alkon sehingga dalam penyaluran alkon dapat memenuhi jumlah peserta KB yang telah aktif serta dengan mengajak peran serta PLKB maupun tenaga kesehatan dalam mengadakan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh kader IMP

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa selama ini institusi masyarakat pedesaan (IMP) mengarahkan calon peserta KB untuk ke pelayanan KB Mandiri dengan menggunakan alat kontrasepsi yang efektif dengan menyalurkan kontrasepsi ulang pil dan kondom kepada masyarakat selain itu meminta PLKB meningkatkan kegiatan penyuluhan bagi kader IMP.

4. Pendataan dan pencatatan

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa selama ini kader Secara aktif melakukan pendekatan kepada masyarakat sehingga dukungan masyarakat meningkat dalam memberikan data kepada kader IMP ketika sedang melaksanakan pendataan

dan pencatatan keluarga sekaligus merangsang kepedulian keluarga yang lebih sejahtera untuk bersama-sama mengangkat keluarga Pra Sejahtera dan KS I agar mencapai tahapan yang lebih tinggi.

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa selama ini institusi masyarakat pedesaan (IMP) dalam melaksanakan pendataan dan pencatatan keluarga secara rutin yaitu dengan melakukan pendataan dan pencatatan keluarga disesuaikan dengan waktu ketika masyarakat sedang ada di rumah.

5. Pertemuan rutin

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa selama ini institusi masyarakat pedesaan (IMP) melakukan kerjasama dengan pemerintah desa untuk membantu dalam menyediakan anggaran sehingga kader IMP dapat mengikuti pertemuan rutin pada Rakor Kecamatan dan Rakor Desa dan mengajak peran aktif Pemerintah desa dalam memberikan dukungan bagi kader IMP untuk memberikan anggaran bagi kader pada kegiatan rakor yang diselenggarakan di kecamatan maupun di desa.

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa selama ini upaya mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi institusi masyarakat pedesaan (IMP) dalam mengikuti pertemuan rutin pada Rakor Kecamatan dan Rakor Desa yaitu dengan melakukan kerjasama dengan ketua RT maupun RW

6. Kegiatan program KB

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa kader IMP menggunakan sarana posyandu dalam menyebarkan informasi tentang KB dan melakukan kegiatan bina keluarga serta mengoptimalkan kegiatan di UPPKs sehingga masyarakat menyadari akan pentingnya kesehatan ibu dan anak.

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa selama ini institusi masyarakat pedesaan (IMP) melakukan kegiatan Posyandu, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat terkait program KB dengan cara mengundang masyarakat hadir dalam kegiatan posyandu

7. Kegiatan Kemandirian

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa selama ini petugas berupaya melakukan berbagai pendekatan dengan masyarakat baik melalui kegiatan arisan maupun mengadakan iuran dengan peserta KB dengan meningkatkan dukungan masyarakat guna terlaksananya program KB melalui peningkatan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa selama ini institusi masyarakat pedesaan (IMP) meningkatkan peran aktif masyarakat untuk menggunakan alat kontrasepsi

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di uraikan dalam bab-bab sebelumnya mengenai Peran Kader

IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) dalam menunjang keberhasilan program KB di Desa Margacinta Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Peran Kader IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) dalam menunjang keberhasilan program KB di Desa Margacinta Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran secara umum sudah berperan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari pendapat informan bahwa Peran Kader IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) dalam menunjang keberhasilan program KB di Desa Margacinta Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran yang menyatakan sudah baik sebesar 53,41% dan yang menyatakan masih kurang sebesar 46,59%. Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa Peran Kader IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) dalam menunjang keberhasilan program KB di Desa Margacinta Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran sudah melaksanakan tujuh peran Institusi Masyarakat Pedesaan dalam menunjang keberhasilan program KB di desa menurut BKKBN (2011:5).

2. Berdasarkan hasil wawancara dengan Institusi Masyarakat Pedesaan di Desa Margacinta Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran bahwa terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi

dalam pelaksanaan Peran Kader IMP di Desa Margacinta Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran antara lain yaitu :

- a. Belum optimalnya IMP dalam melakukan analisis motivasi dan kemampuan masyarakat untuk melakukan perubahan berupa masih rendahnya kemampuan SDM, kurang memadainya fasilitas pendukung dan masih rendahnya kerja keras yang dimiliki petugas sehingga penggunaan alat kontrasepsi kurang dapat di terima oleh masyarakat
- b. Masih kurangnya Kader IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) dalam melakukan bekerja sama dengan masyarakat untuk melakukan perubahan sesuai dengan direncanakan berupa rendahnya kemampuan dan keinginan masyarakat, belum memadainya sumber daya berupa SDM, sarana dan prasarana yang dimiliki
- c. Masih kurangnya Kader IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) dalam menyelenggarakan kegiatan bersama masyarakat dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan, membentuk dan mengembangkan kelembagaan, berupa keterbatasan kemampuan dan keahlian yang dimiliki, masih belum memadainya fasilitas

- pendukung dan sejumlah anggaran yang belum memadai.
- d. Rendahnya kemampuan Kader IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) bersama masyarakat dalam mengambil inisiatif, mengarahkan dan membimbing masyarakat yang disebabkan oleh masih rendahnya kemampuan yang dimiliki petugas dan masyarakat dan sarana dan prasarana yang belum memadai.
3. Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, Kader IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) dalam menunjang keberhasilan program KB di Desa Margacinta Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran yaitu berupaya:
 - a. Upaya mengoptimalkan kader Institusi Masyarakat Pedesaan dalam melakukan analisis motivasi dan kemampuan masyarakat untuk melakukan perubahan berupa upaya meningkatkan kemampuan SDM melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pemberian pengarahan dan bimbingan pada petugas, meningkatkan ketersediaan berbagai fasilitas pendukung dan upaya meningkatkan rasa tanggung jawab dan kerja keras yang dimiliki petugas.
 - b. Upaya agar kader Institusi Masyarakat Pedesaan dalam melakukan bekerja sama dengan masyarakat untuk melakukan perubahan sesuai dengan direncanakan berupa peningkatan kemampuan dan keinginan petugas dan masyarakat, peningkatan sumber daya berupa SDM melalui berbagai kegiatan seperti diklat, seminar dan workshop, upaya melengkapi sarana dan prasarana
 - c. Upaya meningkatkan kemampuan kader Institusi Masyarakat Pedesaan dalam menciptakan situasi kekeluargaan dengan masyarakat dalam menyampaikan program, dengan mempererat jalinan komunikasi langsung dengan masyarakat, meningkatkan sikap petugas agar ramah menghadapi masyarakat, melakukan pendekatan-pendekatan, meningkatkan rasa persaudaraan dengan masyarakat dan lain-lain.
 - d. Upaya meningkatkan kemampuan kader Institusi Masyarakat Pedesaan bersama masyarakat dalam mengambil inisiatif, mengarahkan dan membimbing masyarakat dengan meningkatkan kemampuan yang dimiliki petugas dan masyarakat melalui pemberian arahan dan bimbingan oleh kepala UPTB dan upaya meningkatkan sarana dan prasarana agar memadai.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis kemukakan yaitu:

1. Kader Institusi Masyarakat Pedesaan Desa Margacinta Kecamatan Cijulang, sebaiknya dalam pelaksanaan perannya lebih memfokuskan pada indikator-indikator yang belum optimal sehingga upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang alat kontrasepsi sesuai dengan pedoman dari BKKBN dengan melaksanakan peran kader Institusi Masyarakat Pedesaan yang terdiri atas kegiatan-kegiatan yaitu pencarian diri dengan masyarakat sasaran, menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan dan pemantapan hubungan dengan masyarakat sasaran.
2. Sebaiknya Kader Institusi Masyarakat Pedesaan Desa Margacinta Kecamatan Cijulang lebih berupaya dalam meningkatkan pelaksanaannya dalam mengatasi berbagai hambatan melaksanakan perannya melalui kegiatan kegiatan seperti menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan dan pemantapan hubungan dengan masyarakat sasaran.
3. Sebaiknya Kader Institusi Masyarakat Pedesaan Desa Margacinta Kecamatan Cijulang dalam melaksanakan tugasnya lebih meningkatkan aspek merencanakan, mengorganisasikan,

pmelaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi, dan melaporkan program keluarga berencana sehingga program KB dapat dicapai.

F. DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-buku

- Bagus 2003. *Kader Tenaga Harapan Masyarakat*, Proyek Pengembangan Peyuluhan Gizi, Jakarta
- BKKBN, 2011. *Badan Pelayanan kontasepsi & Pengendalian Lapangan Program KB Nasional*, Jakarta.
- Budi, Dwik. 2010, *Keperawatan Komunitas*, Yogyakarta : Nuha Medika
- Cahyo, Ismawati, 2010. *Posyandu dan Desa Siaga*. Yogyakarta.
- Maramis, W.P. 2006. *Ilmu Perilaku dalam pelayanan Kesehatan*. Surabaya : Airlangga University Press
- Mardikanto, Totok, Soebiato, Poerwoko, 2003 : *Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung : Alfabeta
- Niken, Meilani dkk. 2009. *Kebidanan Komunitas*. Yogyakarta : Fitramaya.

Nasution, Zulkarimen. 2007. *Prinsip-prinsip Komunikasi untuk Penyuluhan*. Jakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia;

Notoatmodjo, 2005, *Promosi kesehatan teori dan Aplikasi*, Jakarta : PT Rineka

Santosa, 2003. *Peran Serta Masyarakat*. Jakarta: Walhi

Suratun, dkk. 2005. *Pelayanan Keluarga Berencana dan Pelayanan Kontrasepsi*. Jakarta: Trans

b. Dokumen lain

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 87/Per/G3/2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggerakan Lini Lapangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga